

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2651>
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2015). *Profil KPPN Klaten*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id/profil/sejarah/114-profil.html#:~:text=Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten berdiri pada tanggal 01 November,dinas Ketua DPRD Kab.Klaten.>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). *IKPA Raih Peringkat ke-3, KPPN Klaten Siapkan Strategi Hadapi Pelaksanaan APBN TA 2022*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id/data-publikasi/berita-terbaru/2859-ikpa-raih-peringkat-ke-3,-kppn-klaten-siapkan-strategi-hadapi-pelaksanaan-apbn-ta-2022.html>
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Hamzah, A. P. (2014). *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*. STAN Press.
- Keputusan Dirjen. (2021). *Kodefikasi segmen akun pada Bagan Akun Standar*.
- Liskha, D. R. (2017). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15619>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, (2016). <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/215~PMK.05~2016Per.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat, (2016). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/225~PMK.05~2016Per.pdf>

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, (2016). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/262~PMK.01~2016Per.pdf>
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).
- Pramita, Y. D., & Sofyani, H. (2015). Otoritas Atasan, Retaliasi dan Locus of Control sebagai Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Manipulasi Laporan Realisasi Anggaran. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 427–436. <https://doi.org/10.22219/jrak.v3i2.2110>
- Renaldi. (2020). Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi BPPSDMP. *Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi Bppsdmp*, 1(1), 67–74. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Jamak/article/view/13077/7710>
- Santie, E. J. G., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2015). Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(2), 852–862. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.2.2015.8908>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.
- Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 02, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 02 340 (2010). http://www.ksap.org/pp71/LAMPIRAN2/lampiran2_3.pdf
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (19th ed.). Penerbit Alfabeta Bandung.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2003).
- Valerisha, A., & Putra, M. A. (2020). Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital? *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 131–137. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3871.131-137>
- Walandouw, S., & Asmianti, S. (2015). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 418–425. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7121/6632>